

## KOMUNIS DI KAMPUNG SANTRI: Perkembangan PKI di Kotagede Yogyakarta 1920-an -1965

Mahendra Pudji Utama dan Dhanang Respati Puguh  
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro  
e-mail: mahendra\_utama@yahoo.com

### Abstract

*This article deals with several factors that influence the growth of Indonesian Communist Party (PKI - Partai Komunis Indonesia) in a reformed Moslem area and it also discusses the relation between Indonesian Communist Party sympathizers and the people of Muhammadiyah in Kotagede around the period of 1920s-1965. The relatively tranquil condition as the result of the cooperative competition among political parties supported by the distinctive character of Muhammadiyah had enabled Indonesian Communist Party to strengthen its position and it finally became the biggest political party in Kotagede since 1960. Eventhough Muhammadiyah is generally known as a reformed Moslem organization that holds high Al Quran and Hadist as a guidance of life, the people of Muhammadiyah tend to propose the values and moral ethics of the nobles which particular control their emotion and behaviour in their social encounter. It explained the condition in Kotagede which was considered calm and quiet although the relation between Indonesia Communist Party and Muhammadiyah in the period discussed in this paper was apparently full of conflicts and resistance.*

**Key Words:** PKI, Muhammadiyah, Kotagede, priyayi, abangan.

### 1. Pendahuluan

Sejak permulaan abad XX Kotagede sering dijadikan tempat penyelenggaraan rapat propaganda yang menghadirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mewakili organisasi Islam, nasionalis, dan komunis. Namun hanya organisasi Islam, khususnya Muhammadiyah, yang mendapat sambutan berarti. Basis kaum muslim reformis di Kotagede mulai kuat sejak mereka mendirikan Syarikatul Mu'tadi (Perkumpulan Ulama) pada 1910-an yang bertujuan untuk membangun masyarakat santri dengan membersihkan Islam dari anasir Jawa, mempelajari Islam langsung dari Alqur'an dan Hadits, menguatkan kesadaran masyarakat terhadap Islam, dan "membangun" *ummat* (Nakamura, 1993: 68). Perkumpulan itu pada 1923 bergabung dengan Muhammadiyah yang berpusat di Kauman, menjadi Muhammadiyah Cabang Kotagede. Penggabungan itu didasarkan pada kesamaan tujuan dan

dimaksudkan untuk memperkuat barisan muslim reformis dalam wadah yang sama.

Memasuki pertengahan 1920-an Muhammadiyah mulai mendapat saingan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara umum PKI memang mendapat dukungan luas di Kotapraja Yogyakarta, terutama di Kotagede dan Umbulharjo. Pendukung PKI di Kotagede terpusat di Prenggan dan Basen. Pada 1950-an hingga pertengahan 1960-an Kotagede dikenal sebagai salah satu basis komunis di Kotapraja Yogyakarta, yang dibuktikan dengan keberhasilan PKI menempati posisi kedua dalam Pemilu 1955 dan posisi pertama dalam Pemilu 1957. Walaupun tidak ada catatan statistik yang dapat diajukan, orang-orang Kotagede yang mengalami suasana kedua Pemilu itu masih mengingat bahwa perolehan suara PKI *undha-undhi* dengan Masyumi (Utama *et al.*, 2004: 26-27 dan 43). Muhammadiyah berperan penting bagi kemenangan Masyumi dalam



kedua Pemilu itu.

Setelah pembubaran Masyumi pada Agustus 1960, sebagian kecil anggotanya, khususnya yang mempunyai kedudukan strategis, misalnya menjadi pengurus kampung dan koperasi kerajinan perak, beralih mendukung PNI dan NU untuk mempertahankan posisi mereka. Namun mereka kebanyakan mengikuti jejak Muhammadiyah dengan menghindari politik praktis dan lebih bergiat dalam gerakan sosial keagamaan. Tidak mengherankan apabila sejak akhir 1960 PKI tumbuh sebagai partai politik dengan jumlah simpatisan terbesar. Orang-orang Kotagede bahkan menyebut periode 1960-an sebagai "*jaman PKI*" (Nakamura, 1993: 106). Berbagai kegiatan yang berakar pada tradisi setempat, misalnya *layatan* dan pertunjukan *kethoprak*, digunakan oleh PKI sebagai media propaganda, sehingga kegiatan-kegiatan itu menjadi identik dengan PKI (Yogasworo *et al.*, 2000: 12).

Keberjayaan PKI di Kotagede merupakan fenomena yang menarik dikaji, karena pada kurun yang sama Muhammadiyah juga telah mendapatkan posisi relatif mapan yang mencerminkan keberhasilan kaum muslim reformis dalam membangun masyarakat santri. Artikel ini membahas sejumlah kondisi yang memungkinkan PKI dapat tumbuh di tengah lingkungan santri, pasang-surut perkembangan PKI sejak awal kemunculannya pada 1920-an hingga menjelang terjadinya Gerakan 30 September (G 30 S) 1965, dan relasi antara kaum santri dan komunis yang direpresentasikan oleh hubungan antara Muhammadiyah dan PKI.

## 2. Kondisi-kondisi yang Mendukung Perkembangan PKI

Terdapat sejumlah kondisi yang memungkinkan PKI dapat berkembang di lingkungan santri di Kotagede. Di antara berbagai organisasi yang telah masuk dan berusaha menanamkan pengaruhnya, hanya Muhammadiyah yang mendapat dukungan luas dari masyarakat Kotagede. Sarekat Islam

(SI) walaupun berazas Islam dan secara ideologis dapat diterima, secara organisasi tidak pernah hadir di Kotagede. SI dinilai berorientasi pada politik praktis dan hal itu dianggap menghambat usaha penegakan syariat Islam. Demikian pula dengan Budi Utomo, tidak ada bukti bahwa organisasi ini pernah kuat di Kotagede (Nakamura, 1993: 54-56). Ini berarti persaingan antarorganisasi untuk mendapatkan pengikut di Kotagede belum begitu tajam, sehingga PKI merasa cukup berpeluang untuk menanamkan pengaruhnya di sini.

Persaingan antarorganisasi yang belum begitu tajam membuat situasi di Kotagede cukup aman. Pertimbangan ini menjadi penting ketika di kota Yogyakarta PKI mendapat tentangan terang-terangan dari kelompok antikomunis. Ketika PKI menggelar rapat umum di Yogyakarta pada Agustus 1924 sebagai "pemanasan" sebelum kongres yang juga akan digelar di situ, pendukung SI dan Muhammadiyah yang hadir dalam rapat umum itu berteriak-teriak meminta tokoh-tokoh PKI yang sedang berpidato untuk turun dari podium. Panitia yang merasa keadaan di Yogyakarta tidak kondusif segera memutuskan untuk memindahkan tempat kongres ke Kotagede yang dianggap lebih aman (McVey, 1965: 294).

Usaha PKI untuk mendapat dukungan di Kotagede juga didasarkan pada penilaian terhadap kondisi objektif masyarakat yang mayoritas merupakan kelompok miskin yang didominasi oleh buruh kerajinan penyu, tanduk, tulang, kulit, ukiran, emas, dan terutama perak. Pada 1922 penduduk Kotagede dilihat dari segi pekerjaan terdiri atas: pegawai pemerintah dan profesional 76 orang; pengusaha 207 orang; tukang, pedagang kecil, dan buruh 600 orang, dan lain-lain (buruh harian) 15 orang. Besarnya jumlah penduduk yang secara ekonomis lemah menjadi ladang subur bagi tumbuhnya PKI. Sementara kelompok yang secara ekonomis lebih baik, yaitu pegawai pemerintah, profesional, dan pengusaha menjadi pendukung Muhammadiyah (van Mook, 1958: 288-289). Muhammadiyah yang lebih mengandalkan dukungan kelompok ekonomi



mapan mengembangkan organisasi berdasarkan rasa saling percaya di antara anggotanya melalui jalinan hubungan bisnis, kekerabatan, dan perkawinan. Organisasi ini menampilkan diri sebagai sebuah *in group* yang kuat. Para pengusaha, misalnya, lebih sering berinteraksi dengan kalangan priyayi keraton Yogyakarta dan cenderung mengambil jarak terhadap orang-orang biasa seperti buruh kerajinan perak dan pedagang kecil (Soemardjan, 1981: 119). Menurut Wertheim (1959: 189), sikap semacam itu justru semakin membuka peluang bagi PKI untuk menanamkan pengaruhnya di kalangan kelompok miskin.

Gerakan pencerahan agama yang dilakukan Muhammadiyah tidak selalu menuai simpati dari kalangan muslim. Reformasi agama yang dilancarkan organisasi ini dianggap sebagai pemaksaan terhadap kelompok muslim lain yang mempunyai penghayatan keagamaan berbeda (Setiadi, 20 Juli 2004).<sup>1</sup> Selain itu juga dianggap sebagai usaha untuk “menghilangkan” *Wong Jawa*.

.... Awit lair aku Islam senajan arang saba mesjid...nganggo picis ya nek diundang sukuran...sarung sing sering ya dinggo kemulan...ya percaya marang Pengeran. Ning pekara sowan Ngarso Dalem neng Mesjid Agung lan Imogiri ya wis ben, kuwi urusanku. Arepa piye aku ki wong Jawa. Lha Mukamadiyah kok ra ngolehke...nglarang...kuwi jenenge meh ngilangke wong Jawa ta...

(....Sejak lahir aku Islam meskipun jarang pergi ke masjid ...memakai peci juga kalau diundang *sukuran*...sarung lebih sering

untuk selimut...ya percaya terhadap Pangeran [Tuhan]. Namun perkara menghadap [berzaiarah—pen.] kepada *Ngarsa Dalem* [Sultan Yogyakarta] di Masjid Agung [di Kotagede] dan Imogiri ya biarlah, itu urusanku. Bagaimanapun aku ini orang Jawa. *Lho* Muhammadiyah kok tidak membolehkan...melarang...itu namanya mau menghilangkan orang Jawa, kan...) (Kartijo, 23 Juli 2004).

Pernyataan kedua informan itu sekaligus menggambarkan pemahaman dan perilaku keagamaan sebagian muslim Kotagede yang sinkretis. Keberadaan kelompok ini diakui pula oleh Haji Bashari Anwar, Ketua Muhammadiyah Kotagede periode 1960-an, yang menyatakan bahwa sebagian muslim Kotagede masih berada pada taraf abangan dan mereka umumnya berfiliasi dengan PKI (Yogasworo *et al.*, 2000: 10-11). Kalangan Muhammadiyah Kotagede mempunyai istilah khas untuk menyebut muslim sinkretis, yaitu “muslim gado-gado”, dan memosisikannya secara berlawanan dengan pengikut Muhammadiyah yang mendefinisikan diri sebagai muslim sejati atau “*tiyang Islam ingkang saestu*” atau “*tiyang Islam ingkang sampurna*” (Nakamura, 1993: 150). “Muslim gado-gado” dengan demikian merupakan istilah yang berkonotasi negatif atau merendahkan (Budiawan, 2004: 106). Itulah sebabnya mereka memilih berafiliasi kepada PKI yang dinilai lebih toleran dan akomodatif baik terhadap Islam maupun tradisi setempat.<sup>2</sup>

### 3. Gambaran Umum Simpatisan PKI

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui sekurang-kurangnya dua hal yang menjadi ciri

<sup>1</sup>Nama-nama informan dalam tulisan ini telah disamarkan, kecuali nama-nama informan yang dikutip dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan. Penyamaran itu didasarkan pada pertimbangan etis sebagai langkah minimal untuk melindungi mereka, dan hal ini merupakan suatu yang lazim dalam kerja etnografis (Spradley, 1991). Dalam konteks kajian historis, penyamaran nama informan sesungguhnya menjadi problematis, sebab hal itu dapat dianggap sebagai penyembunyian atau manipulasi fakta sejarah. Oleh karena itu ditempuh langkah kompromis dengan menyamarkan nama informan di satu sisi dan menyebut lokasi penelitian sesuai dengan nama sebenarnya di sisi lain.

<sup>2</sup>Perkembangan jumlah pendukung PKI yang mencolok pada 1920-an berkaitan langsung dengan sikap toleran dan akomodatif PKI terhadap Islam dan tradisi lokal. Ini merupakan gejala umum di Indonesia. Banten dapat disebut sebagai contoh yang baik untuk menunjukkan bagaimana para ulama yang memegang kepemimpinan sosial dan politik dapat menerima PKI yang menawarkan perspektif baru dalam menentang kekuasaan kolonial yang akhirnya meledak sebagai pemberontakan komunis pada 1926/1927. Para ulama Banten bukan sekedar bersimpati, tetapi bahkan menjadi propagandis PKI (Budiawan, 2004: 89).



umum simpatisan PKI. Pertama, dilihat dari segi keagamaan, mereka adalah muslim sinkretis atau "muslim gado-gado". Penghayatan keislaman mereka terbentuk dari penggabungan antara anasir Islam dan Jawa. Dalam praktik hidup keseharian sinkretisme dapat dilihat pada berbagai aktivitas, antara lain usaha untuk mendapatkan berkah dengan cara *sowan Ngarsa Dalem* atau berziarah ke makam sultan dan keluarganya di kompleks Masjid Agung Mataram di Kotagede dan di Imogiri. Contoh lain adalah *sukuran* yang diselenggarakan ketika seseorang mempunyai kerja besar seperti membangun rumah; atau ketika seseorang menapak tahap-tahap dalam siklus kehidupan manusia mencakup kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian; atau ketika seseorang berhasil melewati situasi kritis/bahaya, misalnya sembuh dari sakit. *Sukuran* adalah istilah yang digunakan oleh orang Kotagede untuk menyebut upacara yang dalam banyak masyarakat di Jawa disebut *slametan* (selamatan). Upacara ini merupakan salah satu karakteristik abangan yang dalam pelaksanaannya melibatkan *mystical beings* yang menunjuk kepada makhluk halus (Geertz, 1981: 19-37), atau Tuhan (Allah) dan makhluk halus sekaligus (Koentjaraningrat, 1984: 319-342).

Kedua, dari segi sosial ekonomi, simpatisan PKI pada umumnya berada di strata bawah dalam struktur masyarakat Kotagede. Mereka merupakan kelompok ekonomi lemah dan kebanyakan bekerja sebagai buruh kerajinan dan pedagang kecil. Pada 1920-an memang ada sekitar 20-an aktivis inti PKI Kotagede yang tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok miskin. Mereka terdiri atas: seorang carik desa, seorang prajurit keraton, seorang pegawai kantor pos, dua orang guru sekolah dasar negeri, seorang tukang emas, dan beberapa orang tukang lain (Nakamura, 1993: 65). Meskipun demikian keberadaan mereka tidak menghapus kenyataan bahwa pada umumnya simpatisan PKI merupakan kelompok ekonomi lemah.

Oleh karena itu, tidak sangat mengherankan jika PKI kemudian dianggap

sebagai partai yang akan membawa *wong cilik* ke kondisi yang lebih baik. Anggapan itu diwakili pendapat yang menyatakan bahwa PKI adalah satu-satunya partai yang menawarkan harapan-harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi kaum miskin (Sudarno, 2 Agustus 2004), "*partene tiyang jujur*" (partainya orang jujur), "*parte sing mbela wong cilik*" (partai yang membela orang kebanyakan), dan "*parte sing ngopeni kethoprak*" (partai yang melestarikan *kethoprak*) (Parto dan Basuki, 26 Juli 2004). Pendapat-pendapat tersebut sekaligus dapat menunjukkan bahwa pemahaman terhadap komunisme menurut logika ilmiah masih menjadi "barang baru" bagi kebanyakan simpatisan PKI. Hanya sebagian kecil pendukung PKI, terutama dari kalangan aktivis, yang memahami dengan cukup baik tentang gagasan-gagasan dan program-program PKI. Keadaan ini bukanlah khas Kotagede, tetapi merupakan suatu yang umum ditemukan di kalangan simpatisan PKI di wilayah Yogyakarta, sebagaimana terlihat dari pengalaman seorang peneliti saat melakukan kerja lapangan dalam penelitian tentang perubahan sosial di Yogyakarta. Pada saat berada di sebuah desa yang mayoritas penduduknya mendukung PKI, peneliti itu secara sengaja memuji kapitalisme untuk memancing sanggahan dari simpatisan PKI, sehingga ia dapat memperkirakan kedalaman pemahaman mereka tentang sosialisme. Namun simpatisan PKI justru *manggut-manggut* membenarkan pernyataan peneliti itu (Söemardjan, 1981: 153). Maka dari itu bukan suatu yang aneh jika simpatisan PKI di Kotagede memahami PKI sebagai partainya orang jujur, membela *wong cilik*, atau bahkan partai yang memajukan *kethoprak*. Simpati dan dukungan yang besar terhadap PKI dengan demikian tidak selalu dapat dihubungkan dengan tingkat pemahaman masyarakat yang relatif baik terhadap ideologi komunisme. Ini merupakan hal lain yang dapat ditambahkan sebagai ciri ketiga simpatisan PKI di Kotagede selain dua ciri yang telah disinggung sebelumnya.

Strategi PKI dalam menjaring simpatisan dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok pimpinan kecil yang militan dan



berdisiplin tinggi. Kelompok-kelompok pimpinan ini bergerak aktif melakukan agitasi dan proparaganda (agiprop) di kalangan pegawai pemerintah, guru, pengusaha, tukang, buruh, dan pemuda. PKI menggunakan berbagai saluran untuk menanamkan pengaruhnya mulai dari badan usaha (koperasi), organisasi massa (misalnya Barisan Tani Indonesia/ BTI, Barisan Buruh Indonesia/ BBI, Pemuda Rakyat/ PR, dan Indonesia Muda/ IM), kegiatan pemuda dan olah raga (misalnya sepak bola), kegiatan sosial (misalnya *layatan*), kesenian pertunjukan tradisional (terutama *kethoprak*), hingga hubungan ketetanggaan.

PKI juga mendirikan lembaga Marx House untuk menyelenggarakan kursus politik yang dapat diikuti bukan saja oleh simpatisan PKI dan anggota organisasi massa yang berafiliasi dengannya, melainkan terbuka bagi setiap orang yang berminat. Melalui kursus itu simpatisan PKI mendapatkan pengetahuan dasar tentang keorganisasian dan Marxisme. Dapat terjadi seseorang menguasai gagasan-gagasan pokok Marxisme bukan dari keikutsertaannya dalam kursus Marx House, melainkan melalui pertemuan-pertemuan pribadi dalam hubungan ketetanggaan, kegiatan sosial di kampung, dan pertemuan antarorganisasi. Seorang anggota IM,<sup>3</sup> misalnya, mengatakan bahwa ia tidak pernah mengikuti kursus Marx House. Pengetahuan tentang Marxisme diperolehnya dari kebiasaan *ngobrol* dengan para pengurus IM yang juga aktivis PKI pada saat mereka bermain sepak bola di kampung Alun-alun. Pengetahuannya semakin bertambah ketika ia dipercaya mewakili IM dalam pertemuan-pertemuan antarorganisasi kepemudaan yang diikuti pula oleh PKI. Bahkan ia kemudian direkrut sebagai aktivis PKI dan dalam beberapa kesempatan dikirim untuk mewakili PKI Kotagede dalam kegiatan-kegiatan partai di berbagai daerah hingga ke Luar Jawa. Menurutny, PKI selalu mendorong orang untuk berpikir rasional. Ia menggambarkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat sesungguhnya

bersumber dari kondisi objektif di lingkungannya.

".... Contohnya adalah kemiskinan kami para buruh perak. Kemiskinan ini bukan takdir, tapi akibat penghisapan oleh kelompok yang lebih kuat. Bisa dari pengusaha perak, feudalis, atau penguasa kolonial yang mengendalikan harga bahan baku. Buruh jadi miskin dan lemah karena dieksploitir, dihisap terus-menerus oleh mereka yang kuat. Nah, nek masalahe ngono, penyelesaiannya bukan berdoa... ndonga rak ngrampungu masalah...itu cuma membuai orang dengan harapan dan mimpi....harus diperjuangkan ...kerja keras agar struktur masyarakat yang feodal dan mengeksploitir pihak lemah bisa dirombak...bagaimana agar majikan menghargai tenaga buruh dengan layak dan manusiawi..." (Setiadi, 14 Juli 2004).

Seseorang yang telah menjadi aktivis berpeluang untuk mendapat pengakuan sebagai anggota resmi PKI atau sebagai "kominis". Mereka yang telah menjadi anggota resmi pada gilirannya akan mendapat kesempatan untuk duduk dalam struktur kepengurusan PKI. Namun demikian persyaratan untuk menjadi seorang komunis bukan hanya berhubungan dengan kedalaman pemahaman terhadap Marxisme dan Komunisme. Ada sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi sebagaimana dituturkan seorang aktivis PKI berikut ini.

"...sudah seringkali aku menjadi utusan partai...hingga ke Luar Jawa....tetapi sampai tragedi ini terjadi [G 30 S 1965—pen.] aku hanya menjadi aktivis. Untuk menjadi kominis dan mendapatkan kartu anggota resmi dari partai....pertama-tama harus berjuang tanpa pamrih...jangan mengharap-kan kekayaan dari partai....Lantas harus siap ditugaskan ke mana saja meskipun harus meninggalkan keluarga...kominis

<sup>3</sup>Indonesia Muda (IM) merupakan organisasi yang mewadahi para pemuda Kotagede. Kegiatan utamanya adalah olah raga, terutama sepak bola, yang dipusatkan di alun-alun Kotagede.



harus loyal pada partai...bersikap jujur, punya disiplin tinggi, dan mematuhi semua aturan partai. Kominis juga tidak boleh memadu...itu *wayuh* Jawanya..." (Setiadi, 17 Juli 2004).

Persyaratan itu menunjukkan bahwa PKI menuntut anggotanya mempunyai integritas moral, baik menurut kriteria yang ditetapkan partai maupun berdasarkan kriteria yang lazim berlaku dalam kehidupan sosial. Persyaratan itu rupanya tidak mudah dipenuhi, sehingga dari simpatisan yang berjumlah ribuan hanya sekitar 500 orang yang mendapat pengakuan sebagai anggota resmi PKI Kotagede. Di samping itu PKI sebenarnya lebih mementingkan keterlibatan sebanyak mungkin simpatisan dalam program-programnya daripada mengurus keanggotaan resmi (Setiadi, 17 Juli 2004).

#### 4. Pasang-surut Perkembangan PKI

Gambaran tentang PKI Kotagede dari segi keorganisasian dan kegiatan pada masa kolonial tidak dapat disampaikan secara memadai sebagai akibat keterbatasan data baik dari sumber tertulis maupun lisan.<sup>4</sup> Hal yang barangkali paling penting dicatat adalah peristiwa kongres PKI di Kotagede pada 1924. Kongres itu melahirkan keputusan bahwa PKI akan segera memulai usaha untuk mengadakan revolusi untuk menengahkan kekuasaan kolonial Belanda, yang kemudian menjelma menjadi pemberontakan komunis 1926-1927 yang gagal (McVey, 1965: 273).

Setelah pemerintah kolonial Belanda menumpas pemberontakan itu PKI bergerak di bawah tanah, sehingga mereka seolah-olah menghilang dari panggung politik. Sejak awal

kemerdekaan Indonesia, dengan didorong oleh Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1946 tentang pembentukan partai politik di tanah air, situasi di Yogyakarta segera dipenuhi oleh ingar-bingar partai politik. PKI kembali muncul di pentas politik dan berhasil memanfaatkan BTI dan BBI (kemudian menjadi Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOBSI) yang dibentuk oleh Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KNI DIY) untuk menggalang massa. Melalui BTI PKI berusaha menarik simpati seluas-luasnya dari kalangan petani dengan mendukung aksi pembagian bahan makanan dan pelaksanaan reformasi agraria (*landreform*)<sup>5</sup> berupa: tuntutan penghapusan pajak kepala atas kaum tani yang dianggap sebagai bentuk lain kerja paksa pada masa kolonial, penghapusan hak-hak konversi atas tanah bekas perkebunan Belanda dan pengembalian tanah itu kepada rakyat, dan tuntutan agar pemerintah desa menyerahkan tanah kas desa dan tanah *lungguh* kepada BTI untuk dibagikan kepada petani tak bertanah. Di pihak lain SOBSI berusaha menarik simpati buruh melalui isu perbaikan upah dan perbaikan kondisi kerja (Soemardjan, 1981: 147). Meskipun demikian, sumbangan kedua organisasi sayap PKI itu dalam penggalangan massa di Kotagede tidak sangat signifikan.

BTI umumnya lebih banyak berperan di luar Kotapraja Yogyakarta, yaitu: Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul, terutama karena pelaksanaan *landreform* di daerah-daerah itu tersendat oleh berbagai hambatan, sehingga memicu BTI untuk menggerakkan massa petani dalam aksi-aksi sepihak. Sebagai contoh adalah peristiwa yang menimpa lurah Wedomartani di Ngemplak Sleman yang "didaulat" oleh BTI dan diusulkan

<sup>4</sup>Berkaitan dengan sumber lisan, para informan yang pernah menjadi simpatisan atau aktivis PKI dan bersedia diwawancarai seluruhnya berkiprah dalam PKI pada periode pasca-Kemerdekaan RI hingga 1965.

<sup>5</sup>Menurut Pejabat Presiden Leimena, *landareform* merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong terciptanya masyarakat sosialis Indonesia sebagai landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana. Melalui *landreform* pemerintah mendistribusikan tanah kepada kaum tani tak bertanah, sehingga setiap petani akan memiliki tanah minimal dua hektar. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menghilangkan kepemilikan tanah secara besar-besaran, menghindari penguasaan lahan pertanian di pedesaan oleh orang-orang kaya di perkotaan sementara lahan itu dikerjakan oleh petani pedesaan yang tidak memiliki tanah sama sekali, dan memberantas berbagai tindakan yang menyengsarakan petani seperti praktik *ijon* (*Kedaulatan Rakyat*, 19 September 1961).



kepada pemerintah untuk "diritul" (*retool*), karena ia tidak jujur dalam melaksanakan *landreform* (*Kedaulatan Rakjat*, 12 Agustus 1964). Ketidاكلancaran pelaksanaan *landreform* telah mendorong pemerintah DIY menetapkan ketentuan tentang pembagian tanah kelebihan di keempat daerah yang telah disebut di atas.<sup>6</sup> Ketentuan pemerintah itu terbukti efektif untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan *landreform*. Di Gunung Kidul, misalnya, kelebihan tanah seluas 120.685 hektar dari 57 orang pemilik yang tersebar di 11 desa berhasil didistribusikan kepada 135 petani penggarap (*Kedaulatan Rakjat*, 2 Oktober 1964). Sementara itu di Kotapraja Yogyakarta tidak pernah dilaporkan adanya aksi sepihak, karena di sini tidak terdapat tuan tanah. Para pemilik tanah memiliki tanah maksimal 15 hektar sesuai dengan ketentuan UU No. 2/ 1960 tentang bagi hasil dan Perpu No. 56/ 1960 tentang batas maksimum kepemilikan tanah (*Kedaulatan Rakjat*, 2 Juni 1961). Keadaan itu membuat redistribusi tanah dan masalah lain yang terkait dengan *landreform* jarang muncul ke permukaan dan sulit dijadikan isu bagi BTI untuk menarik simpati dan memobilisasi petani di wilayah Kotapraja Yogyakarta termasuk di Kotagede.

Hal yang sama dialami pula oleh SOBSI. Isu tentang perbaikan upah dan kondisi kerja buruh tentu saja muncul di Kotagede. Pada 1950-an buruh di sejumlah perusahaan perak bahkan melakukan mogok kerja, tetapi pemogokan itu tidak berubah menjadi konflik yang lebih serius. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa baik pihak pengusaha maupun buruh diwakili oleh dua orang PKI yang secara kebetulan merupakan kakak-beradik. Si kakak mewakili pihak pengusaha, karena ia menjadi salah satu pimpinan dalam Koperasi Pengusaha Produksi Perak Yogyakarta (KP3Y) sejak 1950-an hingga 1965. Sementara adiknya selain menjadi salah satu pendiri juga menjabat

Sekretaris Jenderal SOBSI Yogyakarta. Masalah-masalah yang menyangkut hubungan antara pengusaha dan buruh lebih banyak diselesaikan secara damai melalui perantaraan dan pemanfaatan hubungan kakak-adik itu. Sebagai akibatnya, masalah perburuhan relatif dapat diredam dan tidak ditampilkan sebagai isu untuk menghantam kaum pengusaha. Sampai sejauh itu SOBSI dapat berfungsi untuk memperjuangkan nasib buruh. Namun sejak awal 1960-an kepercayaan buruh di Kotagede terhadap SOBSI mulai luntur, karena pejabat sekretaris jenderal yang terindikasi korupsi tidak ditindak tegas dan dibiarkan tetap menyandang jabatan itu. Keterikatan buruh terhadap SOBSI bukan lagi didasarkan kepercayaan bahwa organisasi itu akan membawa buruh pada kehidupan yang lebih baik, melainkan agar mereka tetap mempunyai kartu anggota yang menjadi syarat untuk tetap dapat bekerja di perusahaan perak (Nakamura, 1993: 106-107).

Kedudukan PKI di Kotagede semakin kuat setelah terbentuk kepengurusan partai di tingkat kecamatan yang disebut Komite Sub Seksi (CSS). CSS Kotagede dibentuk pada 1950-an dengan Sastro Juli sebagai ketua. Tiga seksi penting dalam CSS adalah seksi keanggotaan, pendidikan, dan pemuda dan olah raga. Dengan mengingat bahwa PKI lebih mementingkan pelibatan sebanyak mungkin orang daripada mengurus keanggotaan resmi, dapat dikatakan bahwa kekuatan utama CSS yang sebenarnya terletak pada seksi pendidikan dan seksi pemuda dan olah raga. Seksi pendidikan bertugas melaksanakan agiprop yang selain dimaksudkan sebagai pendidikan politik untuk rakyat juga untuk menyebarluaskan program-program PKI. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan melalui kursus-kursus resmi semacam Marx House, tetapi juga melalui hubungan pertemanan dan ketetanggaan. Bahkan kegiatan olah raga, khususnya sepak bola, digunakan pula sebagai media agiprop (Setiadi, 17 Juli 2004). Media

<sup>6</sup>Ketentuan-ketentuan yang dimaksud terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Daerah DIY 14 September 1964, yaitu: (1) petani penggarap yang mendapatkan tanah kelebihan harus membayar lunas tanah itu kepada pemilik semula dalam waktu 15 tahun, (2) sebelum lunas, petani penggarap tidak boleh memindahkan hak atas tanah itu kepada orang lain, (3) petani penggarap harus dapat meningkatkan produksi dalam waktu dua tahun sejak ia mendapatkan tanah kelebihan, dan (4) petani yang mendapat tanah kelebihan harus menjadi anggota koperasi tani (*Kedaulatan Rakjat*, 1 Oktober 1964).



propaganda lainnya adalah *kethoprak*. Pada sekitar pertengahan dekade 1950-an hingga 1965-an kesenian pertunjukan tradisional ini sangat populer, sehingga orang Kotagede mengenang periode itu sebagai "*jaman kethoprak*" (Nakamura, 1993: 107). Kesenian ini digunakan secara intensif sebagai media propaganda PKI, sehingga *kethoprak* kemudian juga menjadi salah *icon* PKI Kotagede.

Keberhasilan PKI untuk meluaskan pengaruh dan merekrut simpatisan dari berbagai kalangan dapat dilihat dari perolehan suara dalam Pemilu 1955 dan 1957 yang *undha-undhi* dengan Masyumi. Pada Pemilu 1955 Masyumi dan PKI mendapat sekitar 2000 suara, tetapi selisih suara yang tidak terlalu besar telah menempatkan Masyumi di urutan pertama dan PKI di tempat kedua. Sementara PNI yang memperoleh sekitar 500 suara berada di urutan ketiga. Pada Pemilu 1957 PKI berhasil mengungguli Masyumi, juga dengan selisih suara yang relatif kecil, sedangkan PNI tetap di urutan ketiga (Nakamura, 1993: 105-106). Perolehan suara PKI jelas berhubungan dengan keaktifan partai ini dalam penggalangan massa. Setelah kembali ke pentas politik sejak Kemerdekaan RI, secara umum PKI di DIY tampil sebagai satu-satunya partai yang paling aktif menggalang massa di pedesaan dan perkotaan, sementara partai-partai lain tak lebih seperti "kepala yang tertidur tanpa badan" (Soemardjan, 1981: 145). Salah satu kunci keberhasilan dalam penggalangan massa adalah penggunaan metode kerja "turun ke bawah" (*turba*) yang digagas oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). *Turba* awalnya diterapkan oleh kalangan seniman dan sastrawan Lekra dalam kerja penciptaan. Namun dalam perkembangan *turba* dijadikan sebagai gerakan penyadaran terhadap berbagai kondisi yang menghimpit dan tidak menguntungkan nasib masyarakat lapisan bawah, yang mencakup golongan-golongan yang paling menderita hidupnya, yaitu: kaum petani miskin dan buruh tani atau petani tanpa tanah di pedesaan, kaum buruh di perkotaan yang hidup dari menjual atau menggadaikan tenaga, dan kaum nelayan miskin dan buruh

nelayan di wilayah pesisir. Lekra melihat masyarakat lapisan bawah sebagai kelompok yang paling berkepentingan terhadap perubahan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Kata *turba* dapat disejajarkan dengan kata *beleven* dan *meeleven* dalam bahasa Belanda, yang kurang lebih berarti mengalami atau menghayati dan ikut merasakan apa yang dialami atau dihayati dan dirasakan orang lain. *Turba* ditempuh lewat jalur "tiga sama", yaitu: "sama kerja, sama makan, dan sama tidur", artinya bahwa pihak yang melakukan *turba* dan yang menjadi sasarannya berusaha menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama, mengonsumsi makanan yang sama, dan menggunakan tempat dan peralatan tidur yang sama pula. Dengan cara itu Lekra berusaha "menangkap denyut jantung di bawah" dan sekaligus menjadi "juru bicara" untuk mengartikulasikan suara masyarakat lapisan bawah (Setiawan, 2004: 387-389).

Pembubaran Masyumi pada 1 Agustus 1960 praktis telah membuat PKI sebagai partai politik terbesar di Kotagede, apalagi kebanyakan simpatisan Masyumi memilih untuk tidak berpolitik praktis. Mereka memfokuskan diri pada kegiatan sosial keagamaan melalui Muhammadiyah. Dalam kurun waktu yang sama Lekra DIY menetapkan *turba* sebagai gerakan, sehingga usaha penyadaran masyarakat dan penggalangan massa dilakukan secara lebih sistematis dan terorganisasi (Setiawan, 2004: 395-396). Perubahan politik pada tataran nasional dan lokal pada gilirannya mempengaruhi proses-proses yang melibatkan kaum komunis dan kaum santri. Pembubaran Masyumi mengubah konstelasi politik di Yogyakarta. Peta kekuatan partai-partai politik terbelah ke dalam dua kubu. Di satu sisi muncul partai-partai yang menyebut diri sebagai kubu progresif-revolusioner, dan di sisi lain muncul partai-partai yang oleh kelompok progresif-revolusioner dicap sebagai kubu kontrarevolusioner. Kubu pertama mencakup partai-partai pendukung Nasakom: kelompok nasionalis diwakili PNI, kelompok agamis diwakili NU, dan kelompok komunis diwakili PKI. Kubu kontrarevolusioner



meliputi Masyumi, PSI, dan Murba.

Sejak 1959 partai-partai berporos Nasakom telah membentuk Front Nasional (FN), yang segera diikuti oleh pendirian FN di daerah. Hubungan antara PNI, NU, dan PKI sebagai pilar Nasakom berjalan baik kendati kadang-kadang diwarnai pula oleh kecurigaan yang agak berlebihan terhadap salah satu unsur, terutama dari kelompok agama terhadap kelompok komunis. Namun secara umum masing-masing kelompok berusaha menjaga keutuhan kubu progresif-revolusioner. Hal itu dapat dilihat antara lain dari pernyataan NU tentang pentingnya menjaga persatuan di antara kaum progresif-revolusioner untuk menegakkan Nasakom. Pada ulang tahun PNI/ Front Marhaen ke-38, salah seorang tokoh NU, Thaha Abdurrachman, mengatakan bahwa Nasakom harus dilihat laksana kopi susu manis. Kopi menerima susu dan gula, dan begitu pula sebaliknya. Pernyataan itu menggambarkan kesediaan NU yang mewakili golongan agamis untuk menerima unsur nasionalis dan komunis/ sosialis. Harapan yang sama juga ditujukan kepada pihak komunis untuk menerima unsur agamis dan nasionalis. Jika persatuan Nasakom mewujudkan seperti larutan kopi manis, maka "kita akan cepat mencapai sosialisme Indonesia yang diridloi Tuhan" (*Nasional*, 6 Juli 1965).

Kegiatan-kegiatan FN sejak 1960-an difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan Neokolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) dan melancarkan kampanye anti-Nekolim. Pada 1962 Pengurus Daerah FN DIY mengadakan rapat akbar Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara yang dihadiri oleh Presiden Soekarno. "Ganyang Nekolim" yang diserukan Soekarno saat itu menggema ke berbagai sudut Yogyakarta. Pada 14 Agustus 1965 pengganyangan Nekolim diwujudkan melalui gerakan massa untuk menduduki gedung Jefferson Library yang digunakan sebagai perpustakaan dan pusat informasi Kedutaan Amerika Serikat. Pendudukan gedung itu ditandai dengan upacara resmi yang dihadiri Toelchah Mansoer, Soetrisno, anggota Badan

Pengurus Harian, wakil pemerintah, FN DIY, pihak militer, kepolisian, wakil-wakil partai politik dan organisasi massa, dan massa pemuda, buruh, tani, dan wanita berporos Nasakom. Pendudukan gedung itu mendapat dukungan dari Waperdam I Dr. Soebandrio dan Kepala DIY Sultan Hamengku Buwana IX. Selanjutnya gedung Jefferson Library digunakan sebagai pusat kegiatan bagi pihak-pihak progresif-revolusioner yang mencakup: FN DIY, FN Kotapraja Yogyakarta, Front Pemuda, PPMI, GOWJ, Sekretariat Perjuangan Buruh, dan Sekretariat Ormas Tani (*Nasional*, 16 Agustus 1965).

Kampanye anti-Nekolim di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh berbagai perkembangan politik di luar negeri. Serangan India terhadap Kashmir dan Pakistan menjadi katalisator bagi penyatuan unsur-unsur Nasakom di Yogyakarta untuk melancarkan gerakan anti-Nekolim yang ditujukan pada dunia luar. Pada 20 September 1965, di lapangan Militer Secodiningratan, Front Pemuda DIY menyelenggarakan rapat umum. Salah satu hasilnya yang terpenting adalah seruan kecaman atas invasi India ke Kashmir dan Pakistan. Resolusi tersebut ditandatangani oleh Presidium Front Pemuda DIY yang terdiri atas: Pemuda Marhaen, Pemuda Anshor, Pemuda Rakyat, PPMI, dan Pemuda Katholik. Dukungan yang sama juga diberikan oleh Front Pemuda DIY terhadap penyelenggaraan Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) sebagai penolakan terhadap pembangunan pangkalan militer asing, terutama oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat, di berbagai negara di dunia ketiga (*Nasional*, 21 September 1965).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tampak bahwa kampanye anti-Nekolim berpengaruh luas di Yogyakarta. Hampir semua elemen masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh organisasi-organisasi pergerakan yang mempunyai basis pelajar, mahasiswa, kelompok agama, kaum buruh, kaum wanita, kalangan profesional, seniman, tentara, dan partai politik yang mengklaim progresif-revolusioner, turut mengambil bagian dalam



gerakan anti-Nekolim. Suatu yang menarik adalah gerakan itu tidak hanya ditujukan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berada di lingkup lokal dan nasional seperti tampak dari isu-isu tentang pembersihan unsur-unsur yang mewakili pihak kontrarevolusioner, tetapi dimaksudkan pula sebagai respon terhadap berbagai persoalan dalam lingkup yang lebih luas. Sejalan dengan hal itu kekuatan progresif-revolusioner menyatakan dukungan total terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia tentang "Ganyang Malaysia".

Partai-partai politik, organisasi massa, organisasi profesi, sukarelawan, dan pegawai negeri, menyelenggarakan *Training Center* (TC) dalam rangka mendukung "Ganyang Malaysia". TC dilaksanakan baik di wilayah perkotaan maupun di pelosok pedesaan. Di Kotagede, TC bagi para pendukung PKI dikoordinasikan oleh PR dengan jumlah peserta mencapai tiga pleton. Kegiatan itu dilakukan di dalam ruangan dengan meminjam rumah-rumah simpatisan PKI yang cukup luas dan mampu menampung cukup banyak peserta. Di sini para peserta mendapat pendidikan politik khususnya yang terkait dengan kebijakan politik luar negeri tentang anti-Nekolim dan pengetahuan tentang haluan dan arah kebijakan partai (Setiadi, 17 Juli 2007). Di samping itu TC juga dilakukan di tempat terbuka (lapangan), khususnya untuk latihan dasar kemiliteran yang dipandu oleh tentara profesional dari Korem 072 dan Kodim Yogyakarta. Dalam latihan dasar kemiliteran itu para peserta TC dibekali dengan keterampilan untuk menggunakan senjata laras panjang yang dirampas dari pasukan Belanda dan pasukan Jepang semasa Perang Kemerdekaan (Setyadi dan Shodiq, 2003: 117).

Bagi PKI Yogyakarta, penyelenggaraan TC merupakan tindak lanjut dari sidang pleno Komite Sekjen PKI Yogyakarta pada Juli 1965 yang menghasilkan tujuh keputusan sebagai resolusi atas berbagai persoalan, baik yang dihadapi oleh PKI Yogyakarta maupun persoalan nasional dan internasional. Ketujuh

resolusi tersebut adalah: (1) stop kenaikan harga dan tarif, (2) putus hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, (3) persenjataan kaum buruh dan tani, (4) sita modal Inggris dan Amerika Serikat, (5) enyahkan Amerika Serikat dari Vietnam, (6) kembalikan Dominicus Waweioi, pemain sepak bola Indonesia yang hilang di negeri Belanda, kepada pemerintah Indonesia, dan (7) bentuk pengadilan *landreform* di Yogyakarta (*Nasional*, 20 Djuli 1965). Resolusi tersebut dengan cukup jelas menunjukkan bahwa kebijakan PKI Yogyakarta tidak hanya merespon persoalan-persolan di tingkat lokal, tetapi juga menjangkau masalah-masalah yang terjadi pada level nasional dan internasional.

Hasil kerja keras selama penyelenggaraan TC diperlihatkan kepada khalayak melalui pawai yang demonstratif di bawah koordinasi Persatuan FN DIY dalam peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-20 pada 25 Agustus 1965. Pawai itu diikuti oleh semua unsur pendukung Nasakom di Yogyakarta dengan rute: diawali dari Gedung Negara, Jl. Ahmad Dahlan, Suryobrantan, kemudian mengitari Beteng Keraton, dilanjutkan ke Gondomanan, Sayidan, Jl. Tanjung, dan Stadion Kridosono. Dari stadion tersebut para peserta pawai melanjutkan perjalanan kembali ke Gedung Negara dan setelah itu membubarkan diri. Pawai ini dianggap yang terbesar dan terpanjang dalam sejarah revolusi Yogyakarta, karena diikuti lebih dari 1.500 pleton yang terdiri atas: unsur pemuda, pelajar, mahasiswa, buruh, tani, wanita, seniman, kesatuan-kesatuan hansip, sukarelawan, pegawai negeri, dan ABRI, baik yang tergabung dalam partai-partai politik berhaluan Nasakom maupun kesatuan-kesatuan lainnya (*Nasional*, 26 Agustus 1965).

## 5. Hubungan antara PKI dan Muhammadiyah

Sejak awal perkembangan PKI di Kotagede pada 1920-an, hubungan antara pendukung partai itu dengan warga Muhammadiyah lebih sering terjadi dalam bentuk pertentangan yang



kadang-kadang berlanjut menjadi konflik. Salah satu contohnya adalah konflik yang terjadi dalam rapat umum dalam Kongres PKI di Kotagede pada 14 Desember 1924. Beberapa tokoh Muhammadiyah dari Yogyakarta dan Kotagede dan sejumlah anggota Ummat Islam menyusup ke dalam rapat umum itu. Mereka menantang perdebatan langsung dengan pimpinan PKI untuk membuktikan bahwa komunisme secara prinsip bertentangan dengan Islam. Tantangan itu tidak dipenuhi, sehingga mereka melakukan pengacauan dan bahkan mengancam akan menjadikan arena rapat umum sebagai tempat pertumpahan darah. Meskipun demikian, kekacauan itu dapat diatasi dan tidak berbuntut pada terjadinya insiden yang lebih serius. Polisi berhasil memaksa keluar orang-orang yang dianggap sebagai pengacau. Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Ummat Islam serta para pengikutnya meninggalkan arena rapat umum itu untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar muslim sejati (Nakamura, 1993: 67).<sup>7</sup>

Beberapa peneliti mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang konflik itu. Van Mook (1958: 288) dan Wertheim (1959: 190), berdasarkan kenyataan bahwa kekuatan utama Muhammadiyah adalah golongan ekonomi mapan sementara mayoritas pendukung PKI adalah golongan ekonomi lemah, menyebut peristiwa dalam rapat umum itu sebagai ekspresi pertentangan kelas. Namun demikian adanya fakta tentang aktivis inti PKI Kotagede yang berasal dari kalangan ekonomi mapan membuat PKI tidak sepenuhnya mewakili gerakan kaum miskin, sehingga konflik itu tidak mengekspresikan pertentangan kelas. Berdasarkan fakta itu dan dengan menempatkannya dalam konteks kolonialisme, Nakamura (1993: 65) melihat konflik itu sebagai pertentangan lebih lanjut antara agama dan politik. Sejak awal PKI memang menunjukkan sikap antikolonial yang kuat dengan menganjurkan aksi langsung untuk melenyapkan kolonialisme. Di pihak lain, Muhammadiyah yang tidak kurang antikolonial

memilih mewujudkannya melalui gerakan pencerahan agama untuk membangun masyarakat muslim sejati. Pendirian ini muncul sebagai perkembangan lebih lanjut dari pertentangan di dalam Muhammadiyah terutama menyangkut pendefinisian muslim sejati (*tiyang Islam ingkang saestu*). Haji Mohammad Misbach menyatakan bahwa kesejatan seorang muslim terletak pada sikap dan tindakan nyata dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme, dan orang Islam yang menolak pendirian ini adalah muslim *lamisan* (Shiraishi, 1990: 254-257). Oleh karena itu, Misbach mendorong Muhammadiyah untuk menggeser gerakannya ke wilayah politik praktis. Anjuran itu tidak diterima, karena pendapat dominan dalam Muhammadiyah menyatakan bahwa muslim sejati atau *tiyang Islam ingkang saestu* adalah muslim yang menjalankan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Alqur'an dan Hadits. Berpolitik praktis dianggap hanya akan menghambat gerakan pencerahan agama. Wertheim (1959: 189) menilai pandangan ini sebagai pantulan sikap Muhammadiyah yang konservatif dan cenderung loyal kepada pemerintah kolonial. Sikap itu berhubungan secara langsung dengan posisi kelompok ekonomi mapan yang memegang kendali atas Muhammadiyah.

Perdebatan di antara tokoh Muhammadiyah memicu munculnya kelompok muslim komunis yang seringkali melontarkan kritik tajam kepada muslim antikomunis. Sebagai contoh adalah kritik Misbach terhadap Muhammadiyah yang disebutnya sebagai wadah muslim kapitalis. Menurut Misbach, karena kapitalis itu kafir maka Muhammadiyah dengan sendirinya juga kafir. Kritik itu tentu saja merupakan tamparan dan penghinaan serius bagi Muhammadiyah yang merasa memperjuangkan pembentukan masyarakat muslim sejati lewat jalan yang benar. Mereka melontarkan kritik balik kepada kelompok muslim komunis dengan menekankan bahwa tidak ada seorang pun muslim sejati yang bisa menerima komunisme,

<sup>7</sup>Ummat Islam merupakan organisasi sayap politik Muhammadiyah yang bersifat *ad hoc*. Organisasi ini dibentuk sebagai respon terhadap kampanye kaum komunis yang dianggap anti-Islam (Nakamura, 1993: 66).



sebab Islam secara prinsip bertentangan dengan komunisme (Budiawan, 2004: 102).

Perbedaan pendapat itu menunjukkan bahwa konflik antara PKI dan Muhammadiyah di Kotagede merupakan realitas kompleks yang tidak bisa direduksi sebagai pertentangan kelas. Masalah itu menjadi lebih rumit jika dikaitkan dengan bagaimana gagasan tentang *tiyang Islam ingkang saestu* diterjemahkan dalam praktik hidup sehari-hari. Sebagai contoh adalah sikap kaum muslim reformis yang cenderung tidak memberikan toleransi terhadap *sukuran* atau *slametan* yang dianggap bertentangan dengan Islam, sebab "setiap bahannya mempunyai makna magis yang merupakan pengingkaran terhadap paham tauhid" dan secara keseluruhan "mengikuti adat musyrik" (Nakamura, 1993: 149). Sikap ini menghadapkan Muhammadiyah dengan kelompok "muslim gado-gado". Dengan melihat bahwa *sukuran* atau *slametan* merupakan ciri *abangan*, maka konflik itu pun sebenarnya merepresentasikan pertentangan antara kaum *abangan* dengan kaum santri. Pertanyaannya adalah: siapakah kaum santri itu? Secara tautologis pertanyaan itu mudah dijawab, yaitu mereka yang mempraktikkan cara hidup santri yang menekankan dan mengutamakan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Jika jawabannya begitu maka pertanyaan selanjutnya adalah: apakah Islam merupakan satu-satunya sumber nilai bagi kaum santri?

Penelusuran berikut ini akan menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya menganut nilai-nilai yang bersumber dari agama/ ajaran Islam, tetapi juga nilai-nilai yang mengalir dari dunia priyayi. Pembentukan nilai-nilai general yang berlaku bagi kaum muslim reformis yang diadopsi dari dunia priyayi tercermin dari

petikan pidato Martono, salah satu tokoh Muhammadiyah Kotagede, dalam pertemuan warga Muhammadiyah pada 12 Agustus 2004:<sup>8</sup>

"....mestinya kita semua mementingkan untuk datang di pertemuan ini...bukan saja untuk membicarakan macam-macam persoalan bersama di lingkungan kita...yang lebih penting adalah menjaga *silaturahmi* seperti yang dianjurkan oleh pendahulu kita...kita bisa saling mendoakan. Bukankah mengucapkan salam, assalamu'alaikum, itu mendoakan keselamatan seseorang? Menyapa dengan selamat pagi, sugeng ndalu, pripun kabare Pak Dhe, itu juga salam. Waktu bertanya kita menunjukkan *hormat kita, sopan santun kita, kehalusan budi dan akhlak kita kepada orang lain....di dalam batin kita berharap orang itu dalam keadaan sehat, baik, tidak sedang mendapat halangan....*Saling menyapa dan mendoakan keselamatan itu menjadikan *sesrawungan makin regeng....Silaturahmi itu sejalan dengan perintah Islam* dan orang yang menjalankan akan mendapat berkah Allah. Contohnya ini, orang yang tidak datang di sini tidak akan menikmati teh hangat manis gratis (sambil mengangkat gelas di depannya). Ini berkah...." (cetak miring sebagai penekanan dari penulis).

Kutipan pidato itu menunjukkan bahwa kehidupan muslim sejati atau *tiyang Islam ingkang saestu* berhubungan dengan nilai-nilai yang mementingkan segi batiniah, kehalusan budi, dan keikhlasan. Ini berarti bahwa dalam kehidupan keseharian mereka menampilkan diri sebagai kelompok yang menjunjung nilai-nilai dan etika moral priyayi. Kesopanan dan

---

<sup>8</sup>Perlu disampaikan bahwa informan dan pernyataannya yang dikutip di atas sebenarnya tidak relevan dengan tujuan pokok yang dikandung dalam artikel ini sebagai sebuah kajian sejarah. Pertama, informan tersebut tidak mewakili pelaku maupun saksi, sebab ia tidak berasal dari kurun yang sezaman dengan peristiwa sejarah yang sedang dikaji. Kedua, pernyataan informan tersebut diperoleh dari suatu peristiwa (pertemuan warga Muhammadiyah Kotagede) yang berlangsung pada 2004 yang jelas berada di luar lingkup temporal kajian ini. Meskipun demikian, dengan menanggung risiko dicap anakronistik, peristiwa itu tetap ditampilkan dengan tujuan terbatas, yaitu untuk membangun argumentasi tentang keberlakuan nilai-nilai dan etika priyayi di kalangan santri. Langkah ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa nilai-nilai dalam setiap kebudayaan cenderung akan dipelihara atau dilestarikan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi, sehingga keberlakuannya pada dasarnya tidak dapat dibatasi oleh atau dengan angka tahun yang dijadikan lingkup temporal sebagaimana lazim terjadi dalam kajian sejarah. Keberlakuan nilai-nilai dalam setiap kebudayaan bersifat lintas waktu dan lintas generasi. Hal ini setidaknya tercermin dalam pernyataan informan di atas: "...seperti yang dianjurkan oleh pendahulu kita...".



keramahan yang diwujudkan dengan pengucapan salam baik untuk mendoakan maupun menyapa orang lain dan sekaligus menjadi dasar untuk membangun keselarasan dan keakraban sosial (*sesrawungan regeng*) dalam suasana saling menghormati, paralel dengan etik *alus* yang dihubungkan dengan pengendalian emosi dan tingkah laku di kalangan priyayi (Geertz, 1981: 310-314). Bedanya barangkali terletak pada sumber pembenarannya. Bagi kaum priyayi, keselarasan sosial atau *sesrawungan regeng* merupakan nilai hakiki. Ia dibayangkan sebagai suatu tata kehidupan bersama yang harmonis, tertib, dan tenang. Keadaan itu bukanlah suatu yang diusahakan atau diciptakan, tetapi diandaikan sudah ada, sehingga keselarasan sosial itu sudah terbina dan merupakan keadaan yang normal selama tidak terganggu oleh konflik (Soehardi, 1997: 25). Sementara bagi *tiyang Islam ingkang saestu*, *sesrawungan regeng* merupakan pelaksanaan perintah Tuhan, atau "sejalan dengan perintah Islam". Dengan demikian reformasi Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak sekadar bersangkut-paut dengan perjuangan untuk "kembali kepada Alqur'an dan Hadist", tetapi mempunyai kegayutan pula dengan usaha untuk mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai dan etika moral priyayi.

Di pihak lain, sebagai pihak yang diposisikan secara bertentangan dengan *tiyang Islam ingkang saestu*, "muslim gado-gado" atau *abangan* diidentifikasi sebagai kelompok yang dilekati sifat lahiriah atau duniawiah, kasar, dan hawa nafsu. Konstruksi tentang keduniawiah "muslim gado-gado" tampak dalam pandangan Muhammadiyah terhadap kethoprak yang dideskripsikan dengan sangat baik oleh Nakamura sebagai berikut.

Dunia ketoprak adalah *dunia liar dan tidak tertib*, dunia *edan-edanan*....Ceritanya kebanyakan tentang perjuangan pahit atas *keinginan duniawiah* seperti wanita, tahta raja atau posisi penguasa lainnya, wilayah, kekayaan, dan benda-benda magis. Cara memperolehnya juga *duniawiah*:

perkosaan, penculikan, ilmu sihir, persekongkolan, pembunuhan, pengkhianatan, pembunuhan besar-besaran, dan sebagainya. Bahasa yang digunakan termasuk *ungkapan paling kasar dalam ngoko desa; kata-kata kotor dan umpatan* digunakan seenaknya. Para pemain laki-laki dan wanita juga *memperagakan perbuatan-perbuatan liar dalam cara yang tidak diperbolehkan* dalam kehidupan sehari-hari....*kontak badaniah antara laki-laki dan wanita, ungkapan rasa senang, birahi, khawatir, takut, muak, marah, benci, dan sedih dipertontonkan secara bebas dan dibesar-besarkan*....Pola duduk penonton juga *menyimpang dari norma Jawa dan kebiasaan sehari-hari*....laki-laki dan wanita muda adalah penonton utama....*duduk bercampur tanpa memandang kategori jenis kelamin*....*pelacur* terlihat di dalam dan di luar arena pertunjukan....Berbagai jenis *judi* berlangsung di seputar arena pertunjukan. Di belakang panggung anggota rombongan ketoprak sering *melakukan hubungan seks bebas baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, memakai narkoba, dan mengonsumsi alkohol* (Nakamura, 1993: 169-170; cetak miring sebagai penekanan dari penulis).

*Kethoprak* yang sarat dengan nilai-nilai keduniawiah telah membuat kesenian itu dipandang rendah oleh Muhammadiyah. Haji Yatiman Syafi'i, seorang tokoh Muhammadiyah Kotagede, misalnya, mengatakan bahwa dirinya merasa tidak "sreg" dengan *kethoprak* yang di dalamnya penuh dengan hal-hal yang tidak etis (Yogasworo *et al.*, 2000: 12). Tokoh lainnya menyatakan bahwa kesenian itu dikembangkan (*diopeni*) oleh PKI untuk merusak moral dan menyediakan saluran pengumbar nafsu tanpa mengindahkan tatanan hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu mempengaruhi kaum muslim agar semakin jauh dari ajaran Islam (Badri, 25 Juli 2004).

Karena *kethoprak* adalah metafora dunia "muslim gado-gado", sedangkan *kethoprak* dan



"muslim gado-gado" merupakan *icon* PKI, maka ketika Muhammadiyah membicarakan keduniawian *kethoprak* mereka sesungguhnya sedang membicarakan keduniawian orang-orang PKI. Melalui argumentasi itu hendak dikatakan bahwa pertentangan antara Muhammadiyah dan PKI di Kotagede selain bukan merupakan pertentangan kelas, juga bukan pertentangan antara politik dan agama, dan bahkan bukan pula pertentangan antara Islam dan komunisme. Pertentangan itu terjadi antara "Jawa" *versus* "Jawa yang lain". Dalam hal ini "Jawa" menunjuk kepada *tiyang Islam ingkang saestu* yang telah diliputi oleh nilai-nilai dan etika priyayi. Sementara "Jawa yang lain" menunjuk pada "muslim gado-gado" yang lebih diliputi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam dunia *abangan*. Dengan memperhatikan kata, frasa, dan kalimat yang dicetak miring pada deskripsi tentang *kethoprak* di atas, yang memperlihatkan konstruksi Muhammadiyah tentang dunia "muslim gado-gado" dalam cara yang bertentangan secara diametral dengan dunia *tiyang Islam ingkang saestu*, akan tampak bahwa sistem nilai dan etika moral priyayi merupakan elemen penting yang membedakan Islam reformis/ modernis dari Islam tradisional.

Jika argumentasi itu dapat diterima, barangkali hal itu dapat pula digunakan untuk menjelaskan mengapa hubungan antara Muhammadiyah dan PKI pada kurun waktu pascakemerdekaan RI hingga 1965 tidak diwarnai dengan konflik-konflik yang meledak sebagai kekerasan, sungguh pun, seperti selalu ditekankan oleh Muhammadiyah, "Islam secara prinsip bertentangan dengan komunisme". Orang-orang Kotagede bahkan mengatakan bahwa pada saat G 30 S 1965 menjalar ke Yogyakarta, kondisi Kotagede tetap *adhem ayem* dalam pengertian tidak terjadi peristiwa "tembak-tembak" atau pengeroyokan terhadap mereka yang mempunyai riwayat hubungan atau dihubungkan dengan PKI, sementara sejumlah daerah sekitarnya seperti Klaten dan Boyolali telah bergolak (Utama *et al.*, 2004: 53-54). Secara hipotetis dapat dikemukakan bahwa

sistem nilai dan etika moral priyayi yang menekankan pengendalian emosi dan perilaku dapat mencegah orang-orang Muhammadiyah untuk tidak melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap orang-orang PKI yang sedang berada pada titik paling lemah dan sedang menjadi sasaran "operasi pembersihan".

## 7. Simpulan

Pertumbuhan dan perkembangan PKI di Kotagede selain dipengaruhi oleh semangat zaman pada periode pergerakan nasional, juga dipengaruhi oleh keadaan setempat yang relatif kondusif bagi PKI. Persaingan antarorganisasi/ partai politik yang tidak terlalu tajam dan sikap Muhammadiyah yang cenderung eksklusif dan konservatif membuka peluang bagi PKI untuk menanamkan pengaruhnya di Kotagede. Pada masa kolonial PKI terpaksa bergerak di bawah tanah terutama sejak pemberontakan komunis pada 1926/1927 yang merupakan realisasi hasil keputusan Kongres PKI 1924 di Kotagede. Pada periode setelah Kemerdekaan RI, khususnya setelah pembentukan Komite Sub Seksi pada 1950-an, posisi PKI Kotagede semakin kuat yang dibuktikan dengan keberhasilan partai ini dalam Pemilu 1955 dan 1957. Keberhasilan PKI untuk mendapatkan dukungan luas berkaitan dengan kepiawaian partai ini dalam menggunakan saluran-saluran yang telah dikenal oleh masyarakat Kotagede seperti kegiatan sepak bola, tradisi *layatan*, dan pertunjukan *kethoprak*, di samping penerapan metode *turba* yang digagas Lekra. Ketika Masyumi dibubarkan pada 1960, PKI berkembang sebagai partai politik terbesar di Kotagede.

Pada periode 1960 hingga 1965, kegiatan-kegiatan PKI didominasi oleh usaha untuk melakukan konsolidasi dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berada dalam kubu progresif-revolusioner. Di samping itu juga menggalang persatuan dengan partai-partai yang mewakili kelompok nasionalis dan agamis untuk menegakkan poros Nasakom, mengampanyekan gerakan anti-Nekolim, dan mendukung proyek "Ganyang Malaysia".



Meskipun sejak 1960 PKI telah menjadi partai politik terbesar di Kotagede, tetapi hal itu tidak berarti bahwa PKI tidak mempunyai saingan. Saingan utama PKI dalam hal ini adalah Muhammadiyah yang sebelum 1960 menjadi pilar Masyumi Kotagede. Bibit-bibit pertentangan antara Muhammadiyah dan PKI telah terlihat sejak permulaan perkembangan PKI pada 1920-an. Kekuatan utama Muhammadiyah adalah kaum pengusaha. Mereka mengendalikan organisasi ini dengan memanfaatkan jaringan kekerabatan, perkawinan, dan bisnis. Warga Muhammadiyah mengidentifikasi diri sebagai kaum santri yang dalam istilah setempat disebut *tiyang Islam ingkang saestu* atau *tiyang Islam ingkang sampurna*. Pada umumnya santri dipahami sebagai orang Islam yang secara konsekuen dan konsisten menjalankan praktik hidup sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Alquran dan Hadits. Namun dalam kehidupan keseharian, mereka ternyata lebih mengutamakan praktik hidup yang dilandasi nilai-nilai dan etik priyayi.

Di pihak lain, simpatisan PKI dilihat dari segi sosial ekonomi merupakan kelompok ekonomi lemah yang mencakup para buruh dan pedagang kecil. Dilihat dari segi keagamaan mereka adalah muslim sinkretis atau *abangan* yang oleh Muhammadiyah disebut sebagai "muslim gado-gado". Berdasarkan realitas itu, berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang melihat pertentangan antara Muhammadiyah dan PKI di Kotagede sebagai ekspresi pertentangan kelas, atau antara agama dan politik, studi ini menyimpulkan bahwa pertentangan terjadi antara "Jawa" dengan "Jawa yang Lain". "Jawa" merepresentasikan sejumlah realitas yang dikonotasikan dan diasosiasikan dengan suatu yang bersifat superordinatif dalam kebudayaan Jawa, yaitu: Islam reformis/ modernis/ santri, priyayi, dan *tradisi ageng* (tradisi besar). Sementara "Jawa yang Lain", merepresentasikan realitas yang bersifat sebaliknya (subordinatif), yaitu: Islam tradisional/ sinkretis/ *abangan*, *wong cilik*, dan *tradisi alit* (tradisi kecil).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Artikel, dan Laporan Penelitian

- Budiawan. 2004. *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto* (diindonesiakan oleh Tim Penerjemah ELSAM dan Hersri Setawan). Jakarta: ELSAM.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (diindonesikan oleh Aswab Mahasin). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- McVey, Ruth T. 1965. *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Mook, H.J. van. 1958. "Kuta Gede", dalam *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology* (diedit oleh W.F. Wertheim). The Hague: W. Van Hoeve.
- Nakamura, Mitsuo. 1993. *The Crescent Arises Over The Banyan Tree*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiawan, Hersri. 2003. *Aku Eks Tapol*. Yogyakarta: Galang Press.
- Setyadi, Rumekso dan Saiful H. Shodiq. "Dari Ksatria Menjadi Paria: Degradasi Peran dan Pembunuhan Politik Sistematis: Catatan Awal Peristiwa '65/'66 di Jogjakarta", *Tashwirul Afkar* No. 15 tahun 2003. Jakarta: LAKPESDAM dan TAF.



- Shiraishi, Takashi. 1990. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Soehardi, 1997. "Pengembangan Tata Krama dalam Rangka Pembinaan Nilai Budaya", *Humaniora* No. VI, Oktober-November 1997. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (diindonesikan oleh H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotingi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Spradley, James P. 1991. *Metode Etnografi* (diindonesiakan oleh Misbah Zulfa Elizabeth). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Utama, Mahendra Pudji, Dwihendrosono, dan Dhanang Respati Puguh. 2004. "Dari Kumpulan yang Terbuang: G 30 S 1965 dan Dampaknya Menurut Perspektif Eks Tahanan Politik PKI di Yogyakarta". Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.
- Wertheim, W.F.. 1959. *Indonesia Society in Transition: A Study of Social Change*. The Hague and Bandung: W. van Hoeve Ltd.
- Yogasworo *et al.*, 2000. "Menengok Sejarah Kotagede Demi Sebuah Masa Depan", *Brosur Lebaran* No. 38 Th. XXXVIII. Yogyakarta: Angkatan Muda Muhammadiyah Kotagede.

### **Surat Kabar**

- Kedaulatan Rakjat*, 2 Djuni 1961. "Dalam Kotapraja Tidak Ada Tuan Tanah".
- Kedaulatan Rakjat*, 19 September 1961. "Landreform Bagian Mutlak Revolusi".
- Kedaulatan Rakjat*, 12 Agustus 1964. "Lurah Wedomartani "didaulat" oleh BTI".
- Kedaulatan Rakjat*, 2 Oktober 1964. "Hari Tani Nasional di Gunung Kidul".
- Kedaulatan Rakjat*, 1 Oktober 1964. "Tanah Kelebihan Harus Lunas 15 Tahun".
- Nasional*, 6 Djuli 1965. "PNI Pelopori Kerdjasama Nasakom dlm Amal Perbuatan".
- Nasional*, 16 Agustus 1965. "Bekas Gedung Jefferson Library Djadi Pusat Kegiatan Revolusioner".
- Nasional*, 26 Agustus 1965. "Pawai Nasakom Terbesar".

### **DAFTAR INFORMAN**

- Setiadi, tinggal di Kotagede
- Kartijo, tinggal di Kotagede
- Parto, tinggal di Kotagede
- Basuki, tinggal di Kotagede
- Sudarno, tinggal di Kotagede
- Martono, tinggal di Kotagede
- Badri, tinggal di Kotagede